

# **KETERKAITAN AMERIKA SERIKAT DENGAN TUDUHAN PENDANAAN TERORISME OLEH QATAR**

**Novi Rizka Amalia, Siti Latifah Azzahra, Wardah Fara Adiba**

International Relations, Universitas Darussalam Gontor

[novirizka@unida.gontor.ac.id](mailto:novirizka@unida.gontor.ac.id)

## **Abstract**

*The allegation against Qatar for its link with terrorist financing has resulted in the country incorporated in the Gulf Cooperation Countries (GCC) regional organization being excluded from its membership in the organization. Qatar is considered to have violated the agreement in the organization because it has received a Muslim Brotherhood that is considered to threaten and disrupt the stability of the Gulf region's security. In the case of this diplomatic termination, Saudi Arabia became the main control holder. But as we know that Saudi Arabia is a neighboring country that has good relations with Qatar. So that allegedly there is a linkage of the United States in this country's Gulf of diplomatic conflicts. This is based on the inconsistency of the United States in action. Qatar is celebrating one of America's largest trading partners in military supplies, but precisely the United States's president Trump, strongly opposed to Qatar's unproven crime. So with the qualitative method, this paper will discuss the*

*involvement of the united states in Qatar's alleged terrorism financing in terms of national interest achievement.*

**Keywords:** *Qatar; Arab Saudi; United States; Involvement*

### **Abstrak**

*Tuduhan terhadap Qatar karena hubungannya dengan pendanaan teroris telah mengakibatkan negara yang tergabung dalam organisasi regional Gulf Cooperation Countries (GCC) dikeluarkan dari keanggotaannya dalam organisasi. Qatar dianggap telah melanggar perjanjian dalam organisasi karena telah menerima Ikhwanul Muslimin yang dianggap mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan kawasan Teluk. Dalam kasus penghentian diplomatik ini, Arab Saudi menjadi pemegang kendali utama. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Arab Saudi adalah negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan Qatar. Sehingga diduga ada keterkaitan Amerika Serikat dalam konflik diplomatik Teluk negara ini. Ini didasarkan pada ketidakkonsistenan negara-negara bersatu dalam aksi. Qatar sedang merayakan salah satu mitra dagang terbesar Amerika dalam pasokan militer, tetapi justru presiden Amerika Serikat, sangat menentang kejahatan yang belum terbukti di Qatar. Jadi dengan metode kualitatif, makalah ini akan membahas keterlibatan negara-negara bersatu dalam dugaan pendanaan terorisme Qatar dalam hal pencapaian kepentingan nasional.*

**Kata Kunci:** *Qatar; Arab Saudi; Amerika Serikat; Keterlibatan*

### **Pendahuluan**

Qatar merupakan salah satu negara terkaya didunia. Kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan masa lalu patut kita pe-

lajari. Walaupun Qatar sempat menjadi negara yang diboikot Liga Arab karena pertumbuhan ekonominya, dan pesatnya perkembangan Sumber daya alamnya. Namun keuntungan dari hasil sumber daya alam mereka dapat memanfaatkan untuk membangun industri dan pusat keuangan syariah di Qatar. Perubahan ini membuat negara tersebut menjadi salah satu raksasa ekonomi di kawasan teluk. Dengan pendapatan per kapitanya yang besar tentu saja Qatar mengundang rasa iri bagi negara-negara maju lainnya. Akhir-akhir ini Qatar disinyalir ikut memberikan bantuan berupa pendanaan terhadap beberapa kelompok teroris. Sebenarnya tudingan itu bukan hal yang pertama dialami oleh Qatar, dan pada 2014 Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar karena disebut mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC (Gulf Cooperation Countries). Terorisme merupakan tindak pidana berupa kekerasan ditujukan kepada warga sipil yang mengakibatkan munculnya rasa cemas dan tertekan, dengan aktor individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan (Hoffman, 1998).

Tuduhan atas pendanaan terorisme ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Ikhwanul Muslimin di Qatar. Ikhwanul muslimin merupakan gerakan ekstremis Mesir yang ditampung oleh pemerintahan Qatar di Doha. Gerakan yang diketuai oleh Syekh Yusuf al-Qordhowi ini disebut-sebut telah menerima banyak bantuan dari pemerintah Qatar, berkat kekayaannya ini Qatar dilaporkan membayar sebesar US\$1 miliar atau sekitar Rp13,2 triliun kepada bekas kelompok afiliasi Al-Qaeda di Suriah dan aparat keamanan Iran untuk membebaskan 26 anggota Kerajaan Qatar yang dilaporkan diculik kelompok milisi Syiah sokongan Iran (Keatinge, 2017).

Hal ini pula yang menyebabkan Qatar dikeluarkan dari keanggotaan GCC. Al-jazeera sebagai agensi media milik Qatar juga dituding digunakan untuk memberikan pencitraan bagi pemerintah Qatar dan juga sebagai instrumen penting dalam perpolitikan Qatar.

Arab Saudi sebagai salah satu negara berpengaruh di Timur Tengah tentu saja sangat menentukan arah perpolitikan nega-ra-negara teluk yang tergabung di GCC. Arab Saudi meradang ketika melihat pemberitaannya yang tidak baik di media al-Jazeera. Maka setelah munculnya tuduhan atas pendanaan terorisme oleh Qatar, Arab Saudi langsung saja memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Qatar serta melakukan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Sebenarnya sebenarnya ukan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan qatar. l-Jazeera. rgabung di GCC. rgkedua negara ini (Arab Saudi dan Qatar) merupakan dua negara yang bersahabat karena masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan diplomatiknya. Namun saat ini Arab Saudi justru menjadi garda terdepan dalam memusuhi Qatar.

Setelah menganalisa permasalahan Arab Saudi dengan Qatar, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor pemutusan hubungan diplomatik Qatar oleh Arab Saudi. Selain itu tulisan ini juga ingin menganalisa keterkaitan Amerika Serikat dengan krisis diplomatik yang sedang dihadapi Qatar saat ini.

### **Unit Analisa Realisme Neoklasik**

Dalam tulisan ini, teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah realisme neoklasik. Teori ini merupakan turunan dari teori realisme dan merupakan kritik terhadap teori neorealisme. Dalam teori neorealisme yang menjadi fokus utama adalah

politik internasional, bukan politik luar negeri. Untuk menjelaskan politik luar negeri, realisme neoklasik dapat mengkombinasikan antara realisme klasik dan neorealisme. Dimana perilaku negara dan interaksinya di ranah internasional merupakan faktor penentu utama bagi kepentingannya (Rosyidin, 2010). Dalam menjelaskan politik luar negeri, Realisme Neoklasik berupaya mengintegrasikan tingkat analisa unit Realisme Klasik dan tingkat analisa struktur yaitu Neorealisme dalam menjelaskan politik luar negeri (Pradana, 2017) sehingga kami menggunakan kedua tingkat analisa tersebut untuk menganalisa kepentingan antara kedua negara ini. Kaum realisme neoklasik berpendapat bahwa mempunyai dua inti yaitu kepemimpinan dari seorang kepala pemerintahan dan kekuatan negara dalam aspek keamanan (Tim Dunne dan Brian Schmidt dan John Baylis, 2008).

Sehingga jika merujuk pada krisis yang sedang dialami Qatar, hal ini berpacu pada kepentingan dua negara besar Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling berkaitan dan sama-sama memiliki kepentingan nasional. Arab Saudi yang membutuhkan Amerika Serikat dan Amerika Serikat yang membutuhkan Qatar. Tetapi yang menjadi titik fokus dalam permasalahan ini adalah tuduhan keterkaitan Qatar atas pendanaan terorisme. Tuduhan ini berdasarkan pada penerimaan Ikhwanul Muslimin oleh pemerintah Qatar di Doha. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan ekstremis Mesir yang mengungsi ke Qatar, namun kelompok ini justru diberi tempat istimewa di Qatar. Hal ini dapat dibuktikan dengan legalitas pemimpin gerakan ini, Syekh Yusuf al-Qardhawi untuk menyalurkan ajarannya melalui media terbesar milik Qatar yaitu al-Jazeera.

Dengan mengacu pada penjelasan teori realisme neoklasik, tulisan ini menghasilkan hipotesa bahwa pemutusan hubungan diplomatik Qatar dan Arab Saudi dilatar belakangi oleh kepentingan Arab Saudi, selain itu terdapat keterkaitan Amerika Serikat dalam penyebaran propaganda dan tuduhan yang menyebabkan krisis diplomatik Qatar.

### **Pemutusan Hubungan Diplomatik Qatar oleh Arab Saudi**

Krisis diplomatik Qatar diawali pada 5 Juni 2017, dimana negara-negara teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman dan Maldives memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar secara tiba-tiba. Alasan utama yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik ini adalah dugaan atas keterkaitan Qatar dalam pendanaan terorisme. Hal ini dikarenakan Qatar menerima kelompok Ikhwanul Muslimin di Doha dan memberikan legalitas bagi Syekh Yusuf al-Qhordowi selaku pimpinan IM untuk menyalurkan ajarannya lewat media terbesar milik Qatar, al-Jazeera. Qatar dianggap telah melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu dengan menerima kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di Timur Tengah (Sijekto, 2016).

Awal mula kerenggangan hubungan diplomatik kedua negara ini adalah ketika Arab Saudi memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Qatar pada tahun 2002. Penarikan ini didasari atas asumsi Arab Saudi terkait sikap kritis al-Jazeera terhadap Arab Saudi (Fuadi, 2017). Namun hubungan ini dapat kembali erat setelah Qatar meyakinkan Arab Saudi bahwa al-Jazeera akan lebih membatasi jangkauannya di Arab Saudi pada tahun 2008. Untuk

kasus saat ini, Arab Saudi dan aliansinya mengajukan 13 permintaan (Al-Jazeera, 2017) untuk Qatar yaitu:

No	Permintaan Arab Saudi dan aliansinya untuk Qatar
1	Menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutus kerja sama militer dan intelejen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus sesuai dengan sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
2	Segera menutup pangkalan militer Turki, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar
3	Memutus hubungan dengan semua "organisasi teroris, sektarian dan ideologis," khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, al-Qaeda, Fateh al-Sham (dulunya bernama Jabhah Nusrah) dan Hizbullah Libanon. Secara resmi menyatakan pihak-pihak ini sebagai kelompok teror seperti yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan menyetujui semua perbaharuan daftar ini di masa yang akan datang.
4	Menghentikan semua pendanan bagi individu, kelompok ataupun organisasi yang telah dianggap sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara lain.
5	Menyerahkan "tokoh-tokoh teroris", buronan dan individu yang dicari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Membekukan aset mereka, dan memberikan informasi yang diinginkan mengenai tempat tinggal, gerakan dan keuangan- mereka.
6	Menutup Aljazeera dan stasiun afiliasinya.
7	Menghentikan intervensi hubungan internal kedaulatan negara. Berhenti memberikan kewarganegaraan pada buronan Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar bagi warga negara yang melanggar hukum di negara-negara tersebut.

8	Membayar perbaikan dan kompensasi kerugian nyawa dan kerugian finansial lain yang disebabkan oleh kebijakan Qatar di tahun-tahun ini. Jumlahnya akan ditentukan setelah kordinasi dengan Qatar.
9	Meluruskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara Arab dan Teluk lainnya, serta masalah ekonomi, sesuai kesepakatan tahun 2014 yang dicapai dengan Arab Sau-di.
10	Menghentikan komunikasi dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Menyerahkan berkas mengenai kontak Qatar dan dukungan pada kelompok oposisi, serta menyerahkan rincian terkait informasi pribadi mereka dan dukungan Qatar yang diberikan pada mereka
11	Menutup semua kantor berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye (MEE), dll.
12	Menyetujui semua permintaan dalam waktu 10 hari setelah daftar diberikan pada Qatar, atau daftar ini akan menjadi tidak valid.
13	Menyetujui audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui permintaan tersebut, diikuti oleh audit empat bulan sekali pada tahun kedua, dan audit tahunan di 10 tahun setelahnya.

(tabel 1. Diambil dari sumber Al Jazeera tahun 2017)

Dalam keputusan hubungan diplomatiknya dengan Qatar saat ini, Arab Saudi yang merupakan pemasok utama pangan Qatar memutuskan untuk mengembargo distribusi pangannya ke negara tersebut. Selain itu Arab Saudi juga menutup perbatasan udara, darat, dan laut dengan Qatar sehingga Qatar Airways terpaksa harus mengalihkan rute perjalan udara Qatar melalui jalur Afrika dan Iran. Hal-hal tersebut diatas berdampak pada penurunan lan-tai bursa Qatar sebesar 7,2%. Namun Qatar merasa tidak perlu ce-



mas, karena meskipun Qatar negara teluk terkecil, namun Qatar juga merupakan negara teluk terkaya (Tempo, 2017).

Dalam permasalahan ini, Arab Saudi yang anti terhadap paham radikalisme menentang perlakuan baik Qatar terhadap Ikhwan-ul Muslimin. Karena organisasi-organisasi ekstremis semacam ini dianggap akan membawa paham revolusioner yang mengganggu stabilitas keamanan dan pemerintahan negara kawasan (Sijekto, 2016). Selain itu Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Amerika Serikat, atas keselarasan paham anti radikal yang kedua negara ini anut. Hubungan diplomatik keduanya juga didasari oleh kepentingan Arab Saudi dalam ekspor minyaknya ke negara-negara industri Barat (Tempo, 2017).

### **Keterkaitan Amerika Serikat dalam Konflik Arab Saudi-Qatar**

Berbicara mengenai hubungan diplomatik Arab Saudi, tentu tidak terlepas dengan Amerika Serikat. Dua negara yang anti paham radikal ini memutuskan untuk menjalin hubungan luar negeri yang erat. Dalam hal ini Amerika Serikat tidak terlepas dari keinginan untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Arab Saudi merupakan salah satu kawasan dagang Amerika Serikat yang terpenting. Hal ini berarti adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Misalnya ketika Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi, maka Amerika Serikat datang sebagai pemasok utama keperluan militer Arab Saudi. Amerika Serikat menjadikan Arab Saudi sebagai perantara utama untuk mencapai segala kepentingan nasionalnya di kawasan teluk. Dalam krisis Qatar ini, Amerika Serikat diduga melakukan propaganda sehingga menjadikan Arab Saudi seolah-olah pionir utama dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Padahal Amerika Serikat juga memiliki

kepentingan di Qatar berupa lapangan udara serta markaz pelatihan utama militer milik AS. Selain itu Presiden AS saat ini Donald Trump sangat mendukung aksi embargo Qatar oleh negara-negara wilayah teluk, sedangkan Amerika Serikat juga menjadi partner dagang dengan Qatar dalam suplai persenjataan (El-Katiri, 2014).

Tuduhan pendanaan terorisme dianggap tidak tepat jika ditujukan terhadap Qatar. Hal ini karena tidak ada bukti sama sekali yang menyebutkan bahwa Qatar terlibat dalam pendanaan terorisme. Bahkan Qatar ikut berpartisipasi dalam pemberantasan terorisme dengan AS pada tahun 2016. Terkait keputusan Qatar untuk menerima Ikhanul Muslimin, penulis berasumsi bahwa hal ini merupakan kebijakan pemerintah Qatar yang telah dipikirkan matang-matang masalah serta solusinya, mengingat Qatar juga menerima Thaliban, dan mendukung Hamas. Penolakan serta 13 permintaan yang diajukan oleh Arab Saudi dan aliansinya dianggap sebagai permintaan yang tidak rasional serta sebuah bentuk intervensi negara yang melanggar kode etik sebuah organisasi regional. Kri-sis diplomasi ini dapat terselesaikan jika seluruh anggota negara teluk bersedia untuk melakukan mediasi dan membahas inti permasalahan. Terlepas dari itu, maka negara-negara non teluk terutama Amerika Serikat seharusnya tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Qatar juga perlu untuk menghentikan kerjasamanya dengan Amerika Serikat dalam suplai keperluan militer sementara waktu, karena distribusi keperluan militer ini dapat memicu meningkatnya kembali tensi para negara teluk.

## **Kesimpulan**

Qatar merupakan salah satu negara terkaya di wilayah teluk yang tergabung dalam organisasi kerjasama regional antar negara

teluk (Gulf Cooperation Countries). Pada tanggal 5 Juni 2017, Qatar mendapat tuduhan atas keterkaitannya dengan pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Qatar atas salah satu kelompok ekstremis Mesir Ikhwanul Muslimin. Setelah munculnya tuduhan tersebut, Arab Saudi sebagai negara pionir dalam stabilitas wilayah teluk beserta aliansinya (Yaman, Mesir, Bahrain, Maldives, Uni Emirate Arab) memutuskan untuk menghentikan Bungkaran diplomatiknya dengan Qatar. Salah satu bentuk pemutusan hubungan diplomatik mereka adalah embargo bahan pangan serta perbatasan laut, darat dan udara.

Melihat kedekatan hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat, memicu asumsi bahwa Amerika Serikat memiliki keterkaitan dalam krisis diplomatik Qatar ini. Sikap Amerika Serikat yang cenderung tidak konsistenlah yang membuat penulis yakin bahwa Amerika Serikat ikut berperan dalam krisis ini. Inkonsistensi Amerika Serikat dapat dilihat dengan propaganda serta pernyataan-pernyataan Trump dalam tuduhan pendanaan terorisme oleh Qatar. Sedangkan disisi lain, Qatar merupakan partner dagang utama dalam suplai keperluan militer setelah Arab Saudi. Selain itu Amerika Serikat juga memiliki kepentingan nasional berupa markaz pelatihan militer di Qatar.

## Referensi

- Al-Jazeera. (2017, September 3). *Arab States Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf crisis*. Retrieved November 15, 2017, from Al-Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis->
- El-Katiri, M. (2014). United States-Gulf Cooperation Council Security In A Multipolar World. *Strategic Studies Issues and U.S*

*Army War College Press*, 15.

Fuadi, I. (2017). *Apa di Balik Memanasnya Hubungan Saudi dan Qatar?* Jakarta: Kiblat.Net.

Hoffman, B. (1998). *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.

Keatinge, T. (2017, Juni 13). *Mengapa hanya Qatar yang dituduh danai terorisme?* Retrieved Januari 17, 2017, from Dunia: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

Pradana, H. A. (2017). Faktor Kontinuitas Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat Pasca Revolusi Mesir 2011. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 1-30.

Rosyidin, M. (2010). Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Noeklasik. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 150-163.

Sijekto. (2016). Motivasi Negara Dewan Teluk (Arab Saudi, UEA dan Bahrain) Menarik Duta Besarnya Di Qatar. *JOM FISIP*, 3, 2.

Tempo. (2017). *Empat Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi dengan Qatar*. Jakarta: Tempo.Co.

Tim Dunne dan Brian Schmidt dalam John Baylis, S. S. (2008). *The Globalization of World Poltics*. Inggris: Oxford University Press. Hlm. 99.

